



Dampak Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas: Studi Tinjauan Literatur

Yonatan Refael Bagus Alisanto¹, Bunga Putri Regita², Difalia Adinda Putri Setiawan³,
Sandi Nugrah Pratama⁴, Chery Aprilia Saputri⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: refaelalisanto@gmail.com¹, regitabunga589@gmail.com²,
difaliadinda12@gmail.com³, sandinugrah3@gmail.com⁴, cheryaprilial7@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received December 14, 2025

Revised December 16, 2025

Accepted December 20, 2025

Keywords:

Family Hope Program, Poverty Reduction, Social Welfare, Banyumas, Literature Review

ABSTRACT

Background: The Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) is a conditional cash transfer initiative designed to reduce poverty and improve human resource quality by providing financial assistance to low-income families. In Banyumas Regency, the implementation of PKH has shown mixed outcomes in improving access to education and health services as well as in operational effectiveness. Research Objective: This study aims to synthesize research findings on the implementation and impact of PKH in Banyumas Regency from 2020 to 2025, identify the main impact dimensions, and determine key supporting and inhibiting factors affecting program effectiveness. Research Methods: This study employed a literature review approach, analyzing relevant scientific articles, theses, and official government reports. Data were analyzed using content and comparative analysis techniques to map patterns of impact and implementation challenges. Research Results: The findings indicate that PKH has a positive impact on improving access to education and health services for beneficiary families, particularly in reducing school dropout rates and increasing maternal and child health service utilization. However, the long-term economic effects remain limited and depend heavily on implementation quality. Key determinants of effectiveness include targeting accuracy, timeliness of fund distribution, the capacity of program facilitators, and inter-agency coordination. Conclusion: PKH contributes to improving basic welfare among poor households in Banyumas, although its effectiveness remains uneven. Improving data accuracy, strengthening facilitator capacity, and integrating PKH with local economic empowerment programs are essential to achieve more sustainable welfare outcomes.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 14, 2025

Revised December 16, 2025

Accepted December 20, 2025

ABSTRAK

Latar Belakang: Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan instrumen perlindungan sosial bersyarat yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bantuan tunai bagi keluarga miskin. Di Kabupaten Banyumas,

**Kata Kunci:**

Program Keluarga Harapan,
Kemiskinan, Kesejahteraan
Sosial, Banyumas, Tinjauan
Literatur

implementasi PKH menunjukkan hasil yang beragam, baik dalam peningkatan akses pendidikan dan kesehatan maupun efektivitas pelaksanaan di lapangan. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan mensintesis hasil-hasil penelitian terkait implementasi dan dampak PKH di Kabupaten Banyumas selama periode 2020–2025, mengidentifikasi dimensi dampak utama, serta menemukan faktor pendukung dan penghambat efektivitas program. Metode Penelitian: Pendekatan yang digunakan adalah tinjauan literatur (literature review) terhadap artikel ilmiah, tesis, dan laporan resmi pemerintah yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan komparatif untuk memetakan pola dampak dan kendala pelaksanaan. Hasil Penelitian: Hasil kajian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat, terutama dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kunjungan layanan kesehatan ibu-anak. Namun, dampak ekonomi jangka panjang masih terbatas dan sangat bergantung pada kualitas implementasi. Faktor utama penentu efektivitas meliputi Kesimpulan: PKH terbukti berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dasar masyarakat miskin di Banyumas, namun efektivitasnya belum merata. Perbaikan validasi data penerima, peningkatan kapasitas pendamping, dan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi diperlukan agar dampak kesejahteraan lebih berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Yonatan Refael Bagus Alisanto
Universitas Wijaya kusuma Purwokerto
E-mail: refaelalisanto@gmail.com,

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial bersyarat yang dicanangkan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui dukungan keuangan bagi keluarga miskin yang memenuhi syarat serta kewajiban mengikuti layanan kesehatan dan pendidikan (Amanda et al., 2022). Di tingkat kabupaten, PKH diimplementasikan sebagai upaya intervensi langsung terhadap rumah tangga rentan agar terjadi perbaikan akses pendidikan anak, layanan kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Banyumas pada periode 2018–2020 menunjukkan angka yang signifikan pada 2020 jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 225,8 ribu jiwa atau 13,26% yang menegaskan urgensi intervensi perlindungan sosial di wilayah ini (Diskominfo Batang, 2018).

Berbagai kajian lokal dan studi kasus di Banyumas menunjukkan hasil yang beragam terkait capaian PKH. Beberapa penelitian lapangan menunjukkan bahwa PKH berkontribusi pada peningkatan keikutsertaan anak dalam pendidikan dasar dan pada pemenuhan akses layanan kesehatan ibu-anak; namun di sisi lain ditemukan masalah operasional seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan penyaluran dana, dan variasi efektivitas antar



desa/kelompok . Studi kasus di beberapa desa di Banyumas juga mengindikasikan bahwa kualitas pelaksanaan (misalnya pendampingan, verifikasi DTKS, mekanisme penyaluran) sangat menentukan tingkat manfaat yang dirasakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Secara regional, sintesis literatur tentang PKH di Jawa Tengah menguatkan temuan bahwa PKH berpotensi menurunkan kemiskinan tetapi keberhasilan sangat bergantung pada kualitas implementasi dan koordinasi antar-stakeholder. (Yasin & Rizqie Aris, 2023a)

Walaupun banyak studi kasus dan evaluasi program lokal telah dipublikasikan (tesis, laporan evaluasi, artikel jurnal regional) selama rentang 2020–2024, terdapat beberapa kekurangan yang menjadi alasan dilakukannya kajian tinjauan literatur ini. Pertama, sebagian besar penelitian bersifat studi kasus desa atau kecamatan sehingga sulit menggeneralisasi dampak PKH pada tingkat kabupaten; kedua, fokus evaluasi sering terbatas pada aspek administratif atau deskriptif tanpa sintesis kuantitatif yang membandingkan outcome pendidikan, kesehatan, dan indikator ekonomi antar wilayah dalam Banyumas; ketiga, isu-isu baru pasca pandemi (misalnya dampak Covid-19 terhadap kemiskinan dan mekanisme penyaluran bantuan) belum sepenuhnya dikaji secara komprehensif dalam konteks Banyumas. Dengan kata lain, terdapat gap antara banyaknya studi empiris lokal yang terfragmentasi dan kebutuhan akan sintesis literatur yang memetakan bukti dampak PKH di Banyumas dari berbagai kajian 2020–2025.

Berangkat dari uraian tersebut, permasalahan utama yang muncul dan perlu dikaji secara lebih sistematis adalah bagaimana gambaran dampak Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah dipublikasikan dalam rentang waktu 2020–2025. Selain itu, masih terdapat pertanyaan mengenai aspek apa saja yang paling dominan dipengaruhi oleh implementasi PKH, apakah pada dimensi pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan ekonomi rumah tangga, serta sejauh mana konsistensi temuan antarpenelitian menunjukkan keberhasilan atau justru keterbatasan program tersebut. Permasalahan lain yang relevan adalah faktor-faktor apa yang paling sering diidentifikasi sebagai pendukung maupun penghambat efektivitas PKH di Banyumas, khususnya terkait ketepatan sasaran, mekanisme pendampingan, validitas data penerima, dan dinamika pelaksanaan program di tingkat lokal. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada upaya memahami secara komprehensif dampak PKH di Kabupaten Banyumas melalui sintesis literatur, sekaligus menempatkan temuan-temuan tersebut dalam konteks kebijakan perlindungan sosial daerah.

Berdasarkan latar belakang dan gap tersebut, artikel ini bertujuan untuk (1) mensintesis hasil-hasil penelitian dan laporan terkait implementasi dan dampak PKH di Kabupaten Banyumas sepanjang 2020–2025, (2) mengidentifikasi pola keberhasilan dan hambatan pelaksanaan yang paling sering dilaporkan (mis. ketepatan sasaran, keterlambatan, kualitas pendampingan, akurasi data), serta (3) merumuskan implikasi kebijakan praktis bagi pemerintah daerah dan pelaksana program untuk meningkatkan efektivitas PKH terutama dalam rangka memperkuat outcome pendidikan dan kesehatan serta mekanisme penargetan. Tujuan-tujuan ini dirumuskan untuk menutup celah pengetahuan antara studi kasus terpisah dan kebutuhan bukti sintetik yang dapat digunakan pembuat kebijakan lokal guna perbaikan program.

Kontribusi yang diharapkan dari kajian ini adalah memberikan peta bukti (evidence map) yang menggabungkan hasil penelitian lokal dan regional, menyoroti area yang membutuhkan



penelitian lebih lanjut (mis. analisis kuantitatif longitudinal, evaluasi biaya-manfaat, studi dampak pasca-kelulusan/“graduasi”), serta merekomendasikan langkah kebijakan operasional (peningkatan verifikasi DTKS, perbaikan jadwal penyaluran, penguatan kapasitas pendamping) yang relevan untuk memperkuat peran PKH dalam pengentasan kemiskinan di Banyumas. Dengan demikian, kajian ini diharapkan menjadi sumber referensi yang lebih terintegrasi untuk akademisi dan pembuat kebijakan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian berupa tinjauan literatur (literature review) yang bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banyumas berdasarkan publikasi ilmiah dan dokumen resmi yang relevan. Data dan informasi diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber pustaka berupa artikel jurnal nasional terakreditasi, prosiding ilmiah, skripsi atau tesis yang dipublikasikan secara daring, serta laporan resmi pemerintah yang terbit pada rentang tahun 2020–2025. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah daring seperti Google Scholar, Garuda, dan repositori perguruan tinggi, dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan, kemiskinan, kesejahteraan sosial, dan Kabupaten Banyumas.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karya ilmiah dan dokumen kebijakan yang membahas PKH di Kabupaten Banyumas atau wilayah yang relevan secara kontekstual. Sampel penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dengan memilih sumber pustaka yang secara langsung membahas implementasi, dampak, atau evaluasi PKH serta memenuhi kriteria tahun publikasi dan relevansi substansi. Bahan penelitian berupa teks artikel dan laporan dianalisis menggunakan alat bantu pengolahan data berupa matriks sintesis literatur untuk memetakan fokus penelitian, temuan utama, dan keterbatasan masing-masing studi.

Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis), dengan cara mengelompokkan temuan penelitian ke dalam beberapa tema utama, seperti dampak PKH terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Hasil analisis kemudian dibandingkan untuk menemukan pola kesamaan, perbedaan, dan kecenderungan temuan antarpengelitian. Pendekatan tinjauan literatur ini dipilih karena dinilai lebih mampu memberikan gambaran komprehensif dan mendalam dibandingkan metode survei tunggal, khususnya dalam menilai konsistensi dampak PKH di tingkat daerah berdasarkan berbagai temuan empiris yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran dampak Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas berdasarkan temuan-temuan penelitian yang dipublikasikan pada rentang tahun 2020–2025.

Berdasarkan tinjauan kajian lokal dan laporan evaluasi yang dipublikasikan antara 2020–2025, dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banyumas sejauh ini bersifat positif namun terfragmentasi. Beberapa studi kasus di tingkat desa/kecamatan melaporkan adanya peningkatan akses layanan pendidikan dasar (kehadiran dan kelengkapan administrasi sekolah anak) serta peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan ibu-anak di antara Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Contoh studi di Purwojati dan Kecamatan Cilongok menunjukkan



bahwa keluarga penerima melaporkan penggunaan bantuan untuk kebutuhan pendidikan anak dan pemeriksaan kesehatan ibu/balita, serta adanya indikasi perbaikan konsumsi keluarga jangka pendek (Sofianto, 2020). Di sisi lain, evaluasi-evaluasi lokal juga menemukan isu serius seperti ketidaktepatan sasaran (inclusion/exclusion errors), keterlambatan penyaluran dana, dan variasi besar antar-desa dalam efektivitas pelaksanaan sehingga manfaat terasa tidak merata. Laporan resmi kabupaten menunjukkan cakupan PKH yang luas namun menegaskan perlunya perbaikan mutu pendataan dan koordinasi pelaksana di lapangan.

Gambaran ini menggambarkan pola yang khas: PKH memang mampu memberi ruang pengalihan konsumsi yang langsung terasa oleh rumah tangga miskin terutama untuk kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan tetapi efek jangka panjang pada graduate dari kemiskinan bergantung pada kualitas implementasi. Secara praktis, ketika penyaluran tepat waktu dan pendamping lokal aktif, KPM cenderung memprioritaskan penggunaan untuk anak dan layanan kesehatan, sehingga muncul hasil positif yang terukur. Namun, bila terjadi ketidaktepatan sasaran atau hambatan administratif, efek program melemah atau bahkan menimbulkan ketidakpuasan. Pandemi Covid-19 juga mengubah konteks: tekanan ekonomi yang lebih besar membuat bantuan tunai PKH lebih penting, tetapi juga menguji kapasitas mekanisme penyaluran dan pendampingan sehingga beberapa studi lokal mencatat penurunan efektivitas relatif selama periode puncak pandemi. Oleh karena itu, pembuat kebijakan Kabupaten Banyumas perlu menilai tidak hanya cakupan kuantitatif (berapa banyak KPM) tetapi juga kualitas pelayanan ketepatan sasaran, kelancaran penyaluran, dan kapasitas pendamping sebagai penentu apakah dampak positif dapat dipertahankan dan ditransformasikan menjadi perbaikan kesejahteraan yang berkelanjutan (Sutikno & Yusuf, 2023).

2. Dimensi dampak Program Keluarga Harapan yang paling dominan, meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga penerima manfaat.

Literatur lokal 2020–2025 mengelompokkan dampak PKH ke tiga dimensi utama. Pertama, pendidikan: beberapa studi melaporkan peningkatan keteraturan kehadiran sekolah anak, pembelian perlengkapan sekolah, dan penurunan angka putus sekolah pada KPM (Janah, 2023; Azzahra, 2024). Kedua, kesehatan: ada bukti peningkatan kunjungan posyandu, pemeriksaan kehamilan, dan imunisasi balita pada keluarga penerima, terutama ketika pendamping program aktif mendorong akses layanan. Ketiga, kesejahteraan ekonomi rumah tangga: dampak di ranah ekonomi rumah tangga lebih heterogen; sejumlah studi menemukan penambahan konsumsi makanan dan kebutuhan dasar jangka pendek, tetapi bukti perbaikan pendapatan permanen atau aset produktif relatif terbatas dalam kajian-kajian skala kecil (Azzahra, 2024; laporan kabupaten).

Dari segi prioritas, PKH jelas paling konsisten berdampak pada aspek akses: rumah tangga menggunakan bantuan untuk memastikan anak sekolah dan akses layanan kesehatan efek ini mudah diamati dan cepat muncul. Namun, transformasi pada dimensi ekonomi misalnya penciptaan sumber pendapatan baru, investasi aset produktif, atau graduate dari daftar penerima memerlukan intervensi komplementer (pelatihan keterampilan, akses kredit mikro, program penguatan usaha) yang seringkali tidak menjadi bagian inti PKH atau tidak diimplementasikan secara sistematis di tingkat lokal. Oleh karena itu, jika tujuan kebijakan adalah perubahan struktural pada kemiskinan, PKH perlu dipadukan dengan program pendukung yang menargetkan pemberdayaan ekonomi (Yasin & Rizqie Aris, 2023b). Di Banyumas, rekomendasi



praktis adalah memperkuat rujukan layanan dari pendamping PKH ke program pemberdayaan ekonomi lokal dan memastikan monitoring indikator outcome ekonomis jangka menengah agar evaluasi dampak tidak berhenti pada konsumsi singkat semata. Selain itu, peningkatan kualitas pendampingan terbukti memperbesar peluang dampak di ketiga dimensi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan karena pendamping berperan mengarahkan penggunaan dana ke pemenuhan kewajiban program (Kasus et al., 2022).

3. Konsistensi dan variasi temuan antarpelitian dalam menunjukkan keberhasilan maupun keterbatasan implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas.

Analisis perbandingan studi lokal (skripsi, tesis, artikel jurnal) menunjukkan variasi signifikan dalam temuan: beberapa studi menunjukkan hasil positif yang jelas, sementara yang lain menyorot banyak hambatan implementasi sehingga dampak kurang terasa. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan metodologi (kualitatif deskriptif vs survei kuantitatif), unit analisis (desa vs kecamatan vs kabupaten), dan waktu penelitian (pra-/pasca-pandemi). Banyak studi berskala mikro (desa) melaporkan cerita keberhasilan di lokasi tertentu seringkali karena adanya pendamping yang aktif atau mekanisme penyaluran yang baik tetapi studi lain pada lokasi berbeda menyorot masalah ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan pembiayaan. Kesimpulan umum adalah tidak ada konsensus kuantitatif kuat yang mewakili seluruh Banyumas; bukti bersifat kontekstual dan lokasi-spesifik (Yasin & Rizqie Aris, 2023b)

Konsistensi rendah antarpelitian menandakan kebutuhan dua hal: pertama, standarisasi indikator evaluasi misalnya menggunakan indikator outcome yang sama (persentase anak yang tetap bersekolah, kunjungan posyandu, pengeluaran pangan per kapita) agar hasil bisa dibandingkan; kedua, pengumpulan data yang lebih representatif secara kabupaten (sample yang proporsional antar-kecamatan) atau studi longitudinal untuk melihat efek jangka menengah. Hingga saat ini, banyak studi bersifat cross-sectional dan kualitatif sehingga menggambarkan kondisi lokal, tetapi tidak cukup untuk menyatakan bahwa PKH “efektif” atau “tidak efektif” di tingkat kabupaten secara umum. Oleh sebab itu, rekomendasi untuk penelitian lanjutan termasuk melakukan evaluasi kuasi-eksperimental (misalnya propensity score matching) atau systematic review kuantitatif (meta-analysis ringan) yang menggabungkan studi-studi mikro untuk mengestimasi efek rata-rata dan variansnya. Untuk pembuat kebijakan, hasil ini mengindikasikan perlunya monitoring berbasis indikator standar dan pelaporan teragregasi sehingga pembelajaran lokal dapat di-scale up atau perbaikan difokuskan pada titik-titik lemah yang teridentifikasi (Annisa Azzahra et al., 2024).

4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas, khususnya yang berkaitan dengan ketepatan sasaran, mekanisme pendampingan, validitas data penerima, serta dinamika pelaksanaan program di tingkat lokal.

Studi-studi lokal konsisten menyebut beberapa faktor yang mendorong efektivitas PKH: (1) ketepatan pendataan calon KPM (akurasi DTKS), (2) keteraturan dan ketepatan waktu penyaluran dana, (3) kualitas pendampingan lapangan yang proaktif, dan (4) koordinasi antara instansi terkait (Dinas Sosial, kecamatan, dan pihak desa). Di sisi penghambat, literatur mengidentifikasi: (a) kesalahan sasaran (keluarga yang kurang layak tetap menerima atau



keluarga layak tertinggal), (b) keterlambatan penyaluran mengurangi tujuan penggunaan bantuan, (c) kapasitas pendamping yang bervariasi, (d) infrastruktur administrasi yang lemah (akses digital, validasi data), dan (e) stigma sosial yang kadang-kadang mempengaruhi partisipasi penerima. Beberapa penelitian juga menyorot masalah koordinasi lintas program (misalnya rujukan ke program pemberdayaan tidak berjalan lancar) sebagai hambatan pemanfaatan sisi ekonomi jangka panjang (Sutikno et al., 2022)

Faktor-faktor pendukung dan penghambat ini memberikan peta prioritas untuk perbaikan operasional. Perbaikan akurasi DTKS dan mekanisme verifikasi lokal akan mengurangi kesalahan sasaran; digitalisasi yang disertai pelatihan staf dapat mempercepat penyaluran dan memperkecil kebocoran administrasi. Penguatan kapasitas pendamping (pelatihan teknis, insentif kinerja) akan meningkatkan kualitas advokasi kepada KPM sehingga bantuan dipergunakan sesuai tujuan program ini juga memperbesar peluang kolaborasi dengan program pemberdayaan ekonomi (Khoiruddin, 2020). Ketersediaan data terintegrasi antar-instansi (termasuk data pendidikan dan kesehatan) akan memudahkan monitoring outcome dan identifikasi area intervensi terpadu. Akhirnya, aspek non-teknis seperti membangun kepercayaan komunitas, mengurangi stigma, dan pendekatan sensitif-kultural juga vital agar program tidak hanya “memberi” secara material tetapi menguatkan kapasitas masyarakat untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Bagi Banyumas, fokus kebijakan yang paling mendesak adalah memperbaiki pipeline: validasi data → penyaluran tepat waktu → pendampingan berkualitas → rujukan ke program pemberdayaan; memperbaiki satu elemen saja tidak akan cukup jika elemen lain tetap lemah (Salsabilah et al., 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas berdasarkan sintesis literatur yang dipublikasikan pada rentang tahun 2020–2025. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa PKH secara umum memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya dalam menjaga keberlanjutan sekolah anak serta pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan anak. Dampak pada dimensi kesejahteraan ekonomi rumah tangga cenderung bersifat jangka pendek dan lebih terlihat pada pemenuhan kebutuhan dasar, sementara perubahan struktural pada kemandirian ekonomi belum terlihat secara konsisten. Temuan-temuan antarpengelitian menunjukkan variasi yang cukup besar, yang menegaskan bahwa efektivitas PKH di Banyumas sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi di tingkat lokal. Faktor ketepatan sasaran, kelancaran penyaluran bantuan, kapasitas dan peran pendamping, serta koordinasi antarlembaga muncul sebagai penentu utama keberhasilan maupun keterbatasan program. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk memetakan gambaran dampak, dimensi dominan, serta faktor pendukung dan penghambat PKH di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan telah tercapai melalui pendekatan tinjauan literatur ini.

Sebagai saran, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas implementasi PKH di tingkat daerah, khususnya melalui perbaikan akurasi pendataan penerima manfaat, penguatan kapasitas pendamping, serta integrasi PKH dengan program pemberdayaan ekonomi agar dampak kesejahteraan dapat lebih berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan sumber literatur yang tersedia sehingga belum dapat



menangkap dinamika lapangan terbaru secara langsung dan belum memberikan pengukuran kuantitatif dampak pada tingkat kabupaten. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan tinjauan literatur dengan studi lapangan atau metode kuantitatif yang lebih kuat, seperti survei representatif atau studi longitudinal, guna memperdalam pemahaman tentang dampak jangka menengah dan jangka panjang PKH serta memperkuat dasar perumusan kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, A., Sari, L. A., Studi, P., Publik, A., Sosial, F., & Humaniora, D. (2022). KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM E-WARONG KUBE PKH Thahrina Azriah. *Economics, Social and Humanities Journal (Esochum)*, 1(2), 83–94.
- Annisa Azzahra, S., Safitri, D., & Info, A. (2024). *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah : Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Tengah The Role of Social Assistance Programs in Alleviating Poverty in Central Java: Case Study of the Family Hope Program in Central Java*.
- Diskominfo Batang. (2018). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang. *Diskominfo Batang*, 1.
- Kasus, S., Besuki, D., Lumbir, K., & Banyumas, K. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. In *Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Khoiruddin, M. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 8(2), 98–111.
- Salsabilah, S., Nugroho, L., & Zulfahmi. (2023). Kajian Penyaluran Dan Penggunaan Program Keluarga Harapan (Pkh). *Jurnal Economina*, 2(6), 1193–1202.
- Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1), 14–31. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>
- Sutikno, C., Amanda, A., & Misbahudin, M. (2022). Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Inovasi Daerah*, 1(2), 75–87. <https://doi.org/10.56655/jid.v1i2.26>
- Sutikno, C., & Yusuf, M. (2023). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 81–96. <https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6342>
- Yasin, R., & Rizqie Aris, M. (2023a). Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(11), 1112–1121. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i11.1853>
- Yasin, R., & Rizqie Aris, M. (2023b). Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(11), 1112–1121. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i11.1853>